

INTISARI

Desa secara yuridis menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Ponggok, Klaten. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berbasis studi di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen terkait, buku dan internet. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua RW 03, dan BPD Desa Ponggok, Klaten.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Ponggok telah sesuai dengan perundang-undangan maupun prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ponggok menggunakan media digital, terdapat papan informasi yang terpampang di depan kantor balaidesa. Meskipun pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman pada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Pemerintah Desa, APBDES

ABSTRACT

Jurisdictionally according to Law number 6 of 2014 concerning villages is a legal community unit that has regional boundary that has the authority to regulate and manage the affairs of governance, development, and the interest of the local community based on community initiatives, origins, and/or traditional right recognized and respected in the system of government of the Republic of Indonesia (NKRI). As an autonomous region privileges are granted, such as managing the village budget. This study aims to determine the accountability and transparency of APBDES in Ponggok Village, Klaten. This type of research is to use a qualitative approach based on studies in the field.

The data sources used in the study are primary data sources and secondary data. The source of primary data is obtained through interviews and secondary data sources obtained from related documents, books and the internet. Informants in this study were the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Chairperson of RW 03, and BPD Ponggok Village, Klaten.

The results of this research show that the Village Fund Financial Management implemented by the Ponggok Village Government is in accordance with the law and the principles of accountability and transparency. Transparency carried out by the Ponggok Village Government using digital media, there is an information board displayed in front of the Village Office. Although the management of village funds by the village government is very good, understanding of the community still needs to be improved.

Keywords : Accountability, Transparency, Village Government, APBDES